

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kinerja Keuangan**

Menilai kinerja suatu pemerintah daerah yang baik, terdapat dua evaluasi utama yang menjadi pijakan. Penilaian ini harus memperhitungkan baik aspek keuangan maupun non-keuangan. Evaluasi keuangan melibatkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan, yang mencakup data yang diambil dari laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas, dan catatan tambahan dalam laporan keuangan. Evaluasi keuangan ini melibatkan analisis untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan dengan benar. Performa keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi kondisi keuangan, yang didasarkan pada analisis rasio keuangan pemerintah daerah (Layuk, 2023).

##### **2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja adalah suatu hasil keberhasilan pemerintah daerah secara keseluruhan selama periode tertentu. Keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan aset. Kinerja keuangan, pada dasarnya adalah suatu gambaran kondisi keuangan pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Dalam hal ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola aset dan keuangannya serta mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu dilakukan penilaian secara berkala terhadap setiap tugas yang telah diselesaikan untuk memastikan bahwa kinerja keuangan tetap terjaga dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sujarweni, 2017).

Kinerja keuangan adalah hasil atau pencapaian yang telah dicapai oleh manajemen pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola aset secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah daerah berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013).

### **2.1.2 Tujuan Kinerja Keuangan**

Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian melalui penilaian kinerja. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam cara pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Pendekatan dalam pengukuran kinerja keuangan tergantung pada sudut pandang yang digunakan dan tujuan analisisnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi mereka dan memilih alat ukur penilaian kinerja yang sesuai serta menetapkan tujuan kinerja keuangan yang jelas (Munawir, 2014).

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melibatkan sebagai berikut:

a. Mengetahui tingkat likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab keuangan yang harus diselesaikan segera ketika diminta pembayaran. Likuiditas mencirikan sejauh mana pemerintah daerah dapat dengan cepat dan efisien melunasi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam situasi yang memerlukan pembayaran segera.

b. Mengetahui tingkat solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya baik dalam konteks likuidasi keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Mengetahui tingkat rentabilitas

Rentabilitas atau biasa disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

d. Mengetahui tingkat stabilitas

Stabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara konsisten dan stabil. Pengukuran stabilitas ini melibatkan evaluasi kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi hutang-hutangnya dan

membayar bunga atas hutang-hutang tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.

### **2.1.3 Manfaat Kinerja Keuangan**

Menurut (Munawir, 2014) manfaat dari penilaian kinerja keuangan dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan.

## **2.2 Anggaran**

Anggaran atau bisa disebut juga dengan *budgeting* merupakan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan nilai uang untuk meramalkan operasi pemerintahan daerah dalam laporan keuangan serta aliran kas yang sudah di perkirakan sebelumnya.

Anggaran merupakan alat penting bagi manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan dalam suatu kegiatan. Kualitas sebuah anggaran ditentukan oleh kemampuan dalam merencanakan dan

mengendalikannya, jika terjadi penyimbangan dari anggaran karena penganggarannya terlalu tinggi perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan anggaran sebelumnya sehingga pada saat pelaksanaan dapat terwujud dengan baik serta sebagai masukan dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pada periode yang akan datang. Anggaran juga berperan penting dalam membantu pemerintah daerah mencapai tujuan utamanya.

### **2.2.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana terstruktur yang diungkapkan dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam nilai uang yang mencakup seluruh kegiatan pemerintah daerah yang telah direncanakan untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk nilai uang, anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan.

Secara lebih substansial, penganggaran merupakan kesepakatan resmi yang dibuat oleh manajemen yang berkaitan dengan estimasi pendapatan, biaya dan aspek keuangan lainnya untuk periode tertentu di masa yang akan datang (Fuad dkk, 2020).

### **2.2.2 Manfaat Anggaran**

Menurut (Fuad dkk, 2020) Anggaran merupakan bentuk kegiatan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah yang mampu membuat anggaran. Namun, tanpa penyusunan anggaran pemerintah daerah akan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja, tidak memaksimalkan efisiensi dan produktivitas

serta kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kinerja lebih lanjut.

Berikut ini adalah manfaat penyusunan anggaran:

1. Adanya Perencanaan Terpadu

Anggaran berfungsi untuk menyusun rencana dan menjalankan kegiatan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen atau pengendalian yang penting.

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen. Anggaran yang baik membuat pegawai pemerintah daerah memiliki pemahaman yang baik tentang operasi dan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Di samping itu, penyusunan anggaran memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi lebih optimal.

3. Sebagai Alat Koordinasi

Penganggaran dalam pemerintah daerah dapat memperbaiki koordinasi kerja internal. Sistem anggaran memberikan gambaran operasi pemerintah daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar divisi secara keseluruhan.

#### 4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Anggaran memerlukan pencapaian target atau standar kinerja yang dapat dibandingkan dengan hasil aktualnya untuk mengevaluasi pelaksanaan setiap kegiatan. Penetapan standar kinerja membutuhkan pemahaman yang realistis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, penetapan standar dapat menimbulkan tantangan karena standar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakpuasan dan yang terlalu rendah dapat meningkatkan biaya tanpa terkendali serta mengurangi pendapatan dan semangat kerja.

#### 5. Sebagai Alat Evaluasi Kegiatan

Anggaran yang disusun dengan menerapkan standar yang relevan memberikan arahan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah dalam menemukan langkah-langkah yang harus dicapai untuk menyelesaikan kegiatan dengan baik, ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara optimal. Evaluasi terhadap penyimpangan dalam operasional pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi sehingga menjadi masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya.

Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, penyusunan anggaran harus mematuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Realistis

Penyusunan anggaran tidak boleh terlalu optimis maupun terlalu pesimis.

2. Luwes

Tidak terlalu kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Pihak manajemen perlu mengamati perubahan lingkungan yang terus menerus sehingga dapat melakukan penyesuaian bila diperlukan.

3. Berkelanjutan

Penyusunan anggaran memerlukan perhatian yang berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan sebagai usaha yang kemungkinan terjadi.

### **2.2.3 Tujuan Anggaran**

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Menurut (Fuad dkk, 2020) tujuan anggaran bagi pemerintah daerah adalah memprediksi tingkat aktivitas dan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan utama penyusunan anggaran dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan tujuan/sasaran pemerintah daerah secara jelas dan resmi sehingga menghindari kerancuan dan memberikan arah bagi manajemen tentang hal-hal yang ingin dicapai.
2. Mengkomunikasikan tujuan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

3. Menyediakan rencana yang tersusun mengenai kegiatan dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan.
4. Mengkoordinasikan cara/metode yang akan dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Menyediakan alat ukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi sebagai dasar untuk melakukan koreksi.

## **2.3 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Pelaporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (Bappenda Provinsi Jawa Tengah, 2019).

### **2.3.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) biasanya dikeluarkan setidaknya satu kali dalam satu tahun dan tergantung pada situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas dapat mengalami perubahan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat disajikan dengan periode yang lebih lama atau lebih pendek satu tahun, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan entitas tersebut (Fitra, 2019).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) umumnya mencakup sejumlah pos seperti yang berikut ini:

- a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merujuk kepada semua penerimaan yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah yang berkontribusi pada peningkatan Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan ini merupakan hak yang sah dimiliki oleh pemerintah dan tidak memerlukan pengembalian kepada pihak pemerintah. Pengakuan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat dana tersebut diterima dan dicatat dalam Rekening Kas Umum Daerah.

b. Belanja

Belanja merujuk pada semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih selama periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan belanja dilakukan seketika terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Secara khusus pengeluaran, apabila pengeluaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disetujui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Proses ini menandakan bahwa belanja telah sah dan diakui sebagai bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah, dengan kata lain pengakuan belanja melibatkan proses persetujuan yang melibatkan unit yang memiliki tanggung jawab dalam fungsi perbendaharaan untuk memastikan kelayakan pengeluaran tersebut.

c. Transfer

Pengertian transfer secara umum adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk digolongkan kepada Pendapatan LRA, sedangkan transfer digolongkan tersendiri dalam LRA. Transfer keluar yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

d. Surplus/Defisit LRA

Surplus/defisit-LRA merujuk pada perbedaan jumlah yang lebih atau kurang antara pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi dalam satu periode pelaporan tertentu. Selisih positif atau negatif antara penerimaan dan pengeluaran yang tercatat dalam laporan keuangan pada rentang waktu tersebut.

e. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengakuan penerimaan belanja pada saat penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

f. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

g. Pembiayaan neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

h. Sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

### **2.3.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Tujuan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal pemerintah dan meningkatkan koordinasi antar bagian pemerintah. Laporan ini juga berperan dalam menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses prioritas anggaran, selain itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja dengan lebih efektif.

Laporan ini bukan hanya sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pengelolaan anggaran yang lebih strategis dan terarah (Layuk, 2023).

### **2.3.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup penyediaan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai cara menyajikan laporan secara komparatif. Pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Fitra, 2019).

## **2.4 Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. dalam melaksanakan analisis kinerja keuangan daerah ada beberapa rasio yang bisa digunakan, di antaranya adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan.

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi (Halim & Kusufi, 2014).

### 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

### 2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja anggaran dengan total anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi belanja daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

### 3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

#### 4. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menggambarkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

#### 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan untuk mengukur besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi sumber perbandingan dan acuan yang relevan. Dalam upaya menghindari kesan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini mencakup hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Kesimpulan
1	Layuk, 2023	Analisis <i>Cash Flow</i> dan Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penunjang Evaluasi Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara	Untuk mengukur kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara ditinjau dari Laporan arus kas ( <i>Cash Flow</i> ) dan Laporan Realisasi Anggaran.	Deskriptif Kuantitatif	Kesimpulannya dari penelitian ini yaitu analisis yang telah dilakukan pada Laporan arus kas ( <i>Cash Flow</i> ) dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam keadaan baik dan mengalami pertumbuhan yang stabil.
2	Rosanti & Triyanto, 2023	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Kabupaten Klaten	Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio independensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.	Deskriptif Kualitatif	Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten masih belum mencapai tingkat optimal. Meskipun pengelolaan keuangan pada tingkat lokal Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif dan efisien. Tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Penggunaan dana masih belum seimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk pengeluaran operasional daripada belanja modal.
3	Shofwah, 2019	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas	Untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas Sosial	Deskriptif Kuantitatif	Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sepenuhnya dalam

	dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya pada periode 2016-2018.					Surabaya pada periode 2016-2018.	kategori kurang efisien, hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan penggunaan realisasi total anggaran belanja.
4	Muchran dkk, 2021	Analisis Anggaran Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Realisasi untuk Efektivitas Kinerja Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	Untuk apakah Realisasi pada Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan sudah berjalan efektif.	mengetahui Laporan Anggaran Pemerintah Luwu dengan	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis realisasi anggaran, efektivitas dan efisiensi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan telah berhasil menunjukkan tingkat kinerja yang memuaskan dalam mengelola anggaran dengan efektif dan efisien.
5	Setyowati dkk, 2019	Analisis Realisasi (LRA) untuk Kinerja Pada Kecamatan Tarub	Laporan Anggaran Keuangan Kantor Kecamatan Tarub	Untuk kinerja Kantor Kecamatan Tarub dari Laporan Anggaran tahun 2016-2018.	mengetahui keuangan Kecamatan dianalisis Realisasi	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah dikatakan efektif, sementara penggunaan Anggaran Belanja juga terbukti efisien dengan tingkat dan kriteria yang telah ditetapkan dan berhasil mencapai target yang ingin diinginkan.

Sumber: Berbagai Jurnal (2024)